



PERUBAHAN RENGANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
JL. JA. SUPRAPTO NO. 8 PACITAN**

DAFTAR ISI

BAB I	0
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	10
GAMBARAN PELAYANAN	10
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan .	10
2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	12
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.....	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.....	31
BAB III	33
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD.....	33
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	35
BAB IV	40
TUJUAN DAN SASARAN	40
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan...40	
BAB V	45
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
5.1 Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	45
BAB VI	51
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	51
BAB VII	67
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	67
BAB VIII	70
PENUTUP	70

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 dapat tersusun.

Sekretariat Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pacitan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Rencana Strategis Sekretariat Daerah merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, bersifat indikatif dengan mempertimbangkan kesinambungan, dan berkelanjutan dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan serta melanjutkan kegiatan-kegiatan penting yang belum terlaksana.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan seluruh kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan yang kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan serta Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026

Pacitan, Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19670716 199202 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yaitu :

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
2. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
3. Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah)
4. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
5. Renja PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah)

Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai dokumen induk perencanaan tingkat perangkat daerah, Renstra PD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah. Tujuan, strategi dan kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Renstra PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra PD melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

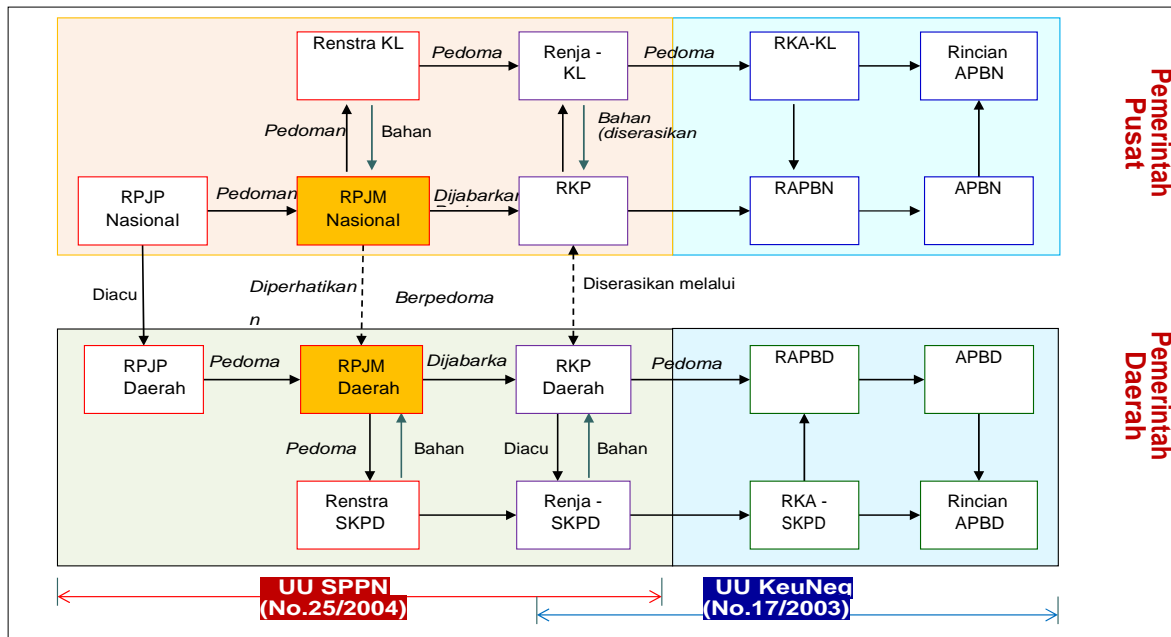
- a. persiapan penyusunan Renstra PD;
- b. penyusunan rancangan Renstra PD;
- c. penyusunan rancangan akhir Renstra PD; dan
- d. penetapan Renstra PD.

Renstra PD menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar, antara lain :

- kemana pelayanan perangkat daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun,
- bagaimana mencapainya dan,
- langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Adapun hubungan antara Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1.
Hubungan RPJMD dengan Renstra PD dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran



Perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. RPJMD Kabupaten Pacitan 2021-2026 yang telah disusun dan merupakan pedoman seluruh pelaksanaan pembangunan lima tahun di wilayah Kabupaten Pacitan yang harus diacu oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Pacitan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2021-2026. Selanjutnya menurut pasal 272 ayat 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Rencana strategis perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Guna menunjang kelancaran penyusunan perubahan rencana strategis sesuai pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta turunannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2016 – 2021.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis mempunyai arti yang sangat penting dalam proses pembangunan, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang sebagai konsekuensi dari apa yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam kaitannya dengan dokumen RPJMD, Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan dan strategi berupa kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun harus mengacu pada RPJMD sebagai bagian dari penjabaran secara teknis dari dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dan saling terkait satu sama lain serta saling menunjang. Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, seperti halnya RPJMD, maka Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 ini tetap memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu melaksanakan tugas membantu Bupati Pacitan dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif.

Penyusunan rencana strategis perangkat daerah selain sebagai wujud penjabaran dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yakni Dokumen RPJMD juga menjadi landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja merupakan

perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan asaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041) ;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
 27. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kerdudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

28. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pacitan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan arahan, pedoman, acuan dan landasan bagi aparatur di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka turut mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pacitan secara nyata ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- b. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan disertai dengan indikator kinerja, target dan pagu anggaran indikatif untuk kurun waktu 2021-2026;
- c. Menciptakan mekanisme pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan pada tahun 2021-2026 untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja di masa yang akan datang;
- d. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel guna mendorong penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD; Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD; Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; serta Penentuan Isu-Isu Strategis di Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, serta Strategi dan Kebijakan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Pacitan.

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretariat Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 189 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 130 tahun 2021 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Sekretariat Daerah terdiri dari :

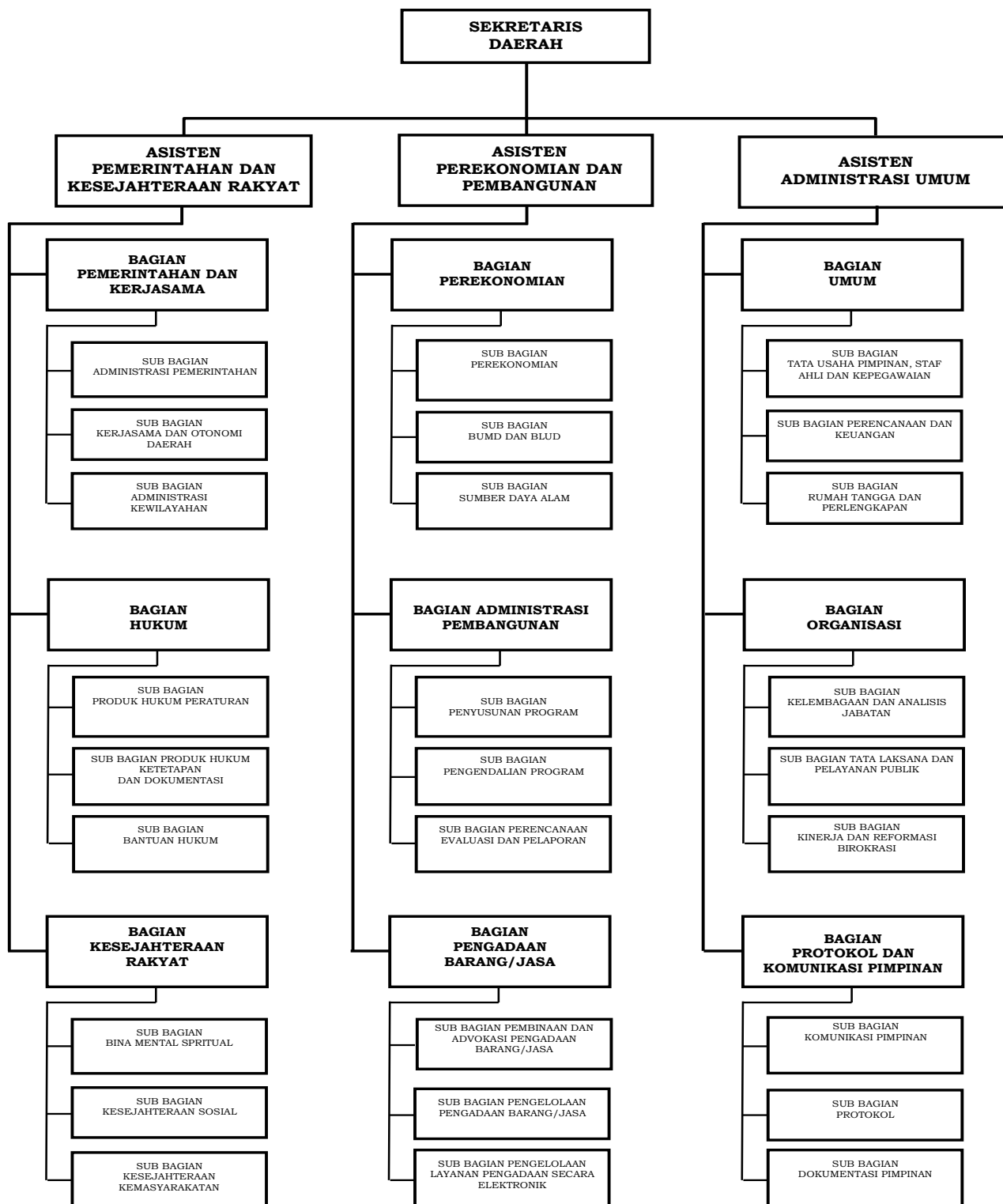
- a. SEKRETARIS DAERAH
- b. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 - 1) Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
 - 2) Bagian Hukum
 - 3) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

- c. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
 - 1) Bagian Perekonomian
 - 2) Bagian Pembangunan
 - 3) Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
- d. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
 - 1) Bagian Umum
 - 2) Bagian Organisasi
 - 2) Bagian Hubungan Masyarakat
- e. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Apabila dilihat dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut :

Gambar II.1.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan



2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan mempunyai peran sangat vital dalam organisasi. Komposisi Pegawai berdasarkan Status ASN sampai dengan bulan Juli 2021 adalah sebagaimana dalam Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel II.1 berikut.

Tabel II.2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Status ASN
Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

NO	Status ASN	Jumlah	Prosentase	Keterangan
1	ASN	138	58,23%	Terdiri dari PNS
2	Non ASN	99	41,77%	Terdiri dari : 1. Kontrak Daerah 2. Kontrak Kegiatan
Jumlah		211		

Komposisi ASN PNS berdasar Pangkat dan golongan Ruang adalah sebagai berikut :

Tabel II.2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

NO	PANGKAT	GOL/ RUANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
			L	P		
1	Pembina Utama Madya	IV / d	1	-	1	0.72%
2	Pembina Utama Muda	IV / c	2	-	2	1.45%
3	Pembina Tingkat I	IV / b	8	1	9	6.52%
4	Pembina	IV / a	1	-	1	0.72%
5	Penata Tingkat I	III / d	10	8	18	13.04%
6	Penata	III / c	13	10	23	16.67%
7	Penata Muda Tingkat I	III / b	14	10	24	17.39%
8	Penata Muda	III / a	8	4	12	8.70%
9	Pengatur Tingkat I	II / d	2	2	4	2.90%
10	Pengatur	II / c	16	13	29	21.01%
11	Pengatur Muda Tingkat I	II / b	2	3	5	3.62%
12	Pengatur Muda	II / a	5	3	8	5.80%

13	Juru Tingkat I	I / d	-	-	-	0.00%
14	Juru	I / c	2	-	2	1.45%
15	Juru Muda Tingkat I	I / b	-	-	-	0.00%
16	Juru Muda	I / a	-	-	-	0.00%
		Jumlah	84	54	138	100.00%

Sumber: Bagian Umum (Juli, 2021)

Komposisi ASN PNS berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel II.3 berikut.

Tabel II.2.3
Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
		L	P		
1	S-2	16	8	24	17.39%
2	S-1 / D-IV	27	17	44	31.88%
3	D-III	2	2	4	2.90%
4	D-II	1	3	4	2.90%
5	D-I	-	-	-	-
6	SLTA / SEDERAJAT	32	24	56	40.58%
7	SLTP / SEDERAJAT	6	-	6	4.35%
8	SD	-	-	-	-
	JUMLAH	84	54	138	100.00%

Sumber: Bagian Umum (Januari, 2018)

Berdasarkan Status ASN terdiri dari PNS 138 Orang (58,23%), Non ASN 99 Orang (41,77%), berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan PNS di lingkup Sekretariat Daerah terdiri dari S-2 sebanyak 24 orang (17,39%), S-1/D-IV sebanyak 44 orang (31,88%), D-III sebanyak 4 orang (2,90%), D-II sebanyak 4 orang (2,90%), SLTA/Sederajat sebanyak 56 orang (40,58%) dan SLTP Sederajat sebanyak 6 orang (4,35%).

Berdasar jumlah ASN dan pendidikan masih menjadi salah satu kendala di Setda karena pegawai yang tersedia belum mencukupi kebutuhan yang ada sesuai dengan peta jabatan dan ada.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya di Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, memiliki sarana prasarana berupa aset dan modal dengan kondisi sampai dengan bulan Desember 2017 sebagai berikut :

Tabel II.2.4
Sarana dan Prasarana
Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
	Alat Pendingin Ruangan		
1	A.C. Split	94	Baik
2	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	11	Baik
3	Pompa Air	12	Baik
4	Portable Generating Set	2	Baik
	Sound System		
5	Audio Amplifier	3	Baik
6	Audio Mixing Console	1	Baik
7	Audio Master Control Unit	1	Baik
8	Audio Filter	1	Baik
9	Audio Control (Central Unit)	1	Baik
10	Audio Visual	1	Baik
11	Equalizer	1	Baik
12	Digital Audio Storage System	1	Baik
13	Loudspeaker	4	Baik
14	Microphone/Wireless MIC	7	Baik
15	Mixer	1	Baik
16	Mic Conference	11	Baik
17	Microphone Connector Box	2	Baik
18	Cable	3	Baik
19	Sound System	20	Baik
20	Stationary Generating Set	1	Baik
21	Stabilisator	2	Baik
22	Set Studio Light Signal	1	Baik
23	Surge Arrester	1	Baik
	Bangunan/Gedung		
24	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	5	Baik
25	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	1	Baik
26	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen (YABI)	2	Baik
27	Bangunan Gedung Tempat Kerja lainnya	1	Baik
28	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8	Baik
29	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	3	Baik
30	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen	1	Baik
31	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1	Baik
32	Bangunan Tempat Parkir	1	Baik

33	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	Baik
34	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	3	Baik
35	Pagar Semi Permanen	2	Baik
36	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	6	Baik
37	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Baik
38	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	Baik
39	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	2	Baik
40	Taman Permanen	1	Baik
41	Taman Semi Permanen	3	Baik
	Alat Audio		
42	Drone	1	Baik
43	Camera Digital	18	Baik
44	Camera Electronic	1	Baik
45	Lensa Filter	2	Baik
	Alat Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga		
46	Catering Set (Panci Pengukus)	61	Baik
47	Dispenser	15	Baik
48	Etalase	9	Baik
49	Gordyin/Kray	1	Baik
50	Karpet	6	Baik
51	Kasur/Spring Bed	3	Baik
52	Kipas Angin	7	Baik
53	Kompor Gas (Alat Dapur)	11	Baik
54	Kontainer	20	Baik
55	Lampu-lampu Kristal	2	Baik
56	Lampu Hias	8	Baik
57	LUKISAN	1	Baik
58	Lukisan Cat Air	14	Baik
59	Lambang Instansi	4	Baik
60	Lemari Es	15	Baik
61	Mesin Penghitung Uang	1	Baik
62	Mesin Pemotong Rumput	14	Baik
63	Mesin Absen (Time Recorder)	3	Baik
64	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	10	Baik
65	Mesin Cuci	11	Baik
66	Mesin Pengering Pakaian	7	Baik
67	Nakas	11	Baik
68	Oven Listrik	8	Baik
69	Papan Visual/Papan Nama	25	Baik
70	Pahatan Batu (tempat duduk batu alam)	2	Baik
71	Presto Cooker	2	Baik
72	Publik Astari (Pembatas Antrian)	18	Baik
73	Router	1	Baik
74	Rak Besi	2	Baik
75	Rak Sepatu (Almunium)	1	Baik
76	Rak Kayu	8	Baik
77	Rak Sepatu	6	Baik
78	Rice Cooker (Alat Dapur)	12	Baik

79	Reach In Freezer	1	Baik
80	Bracket Standing Peralatan	3	Baik
81	Bendera Merah Putih	5	Baik
82	Coffee Maker	17	Baik
83	Blender	20	Baik
84	Facsimile	8	Baik
85	GPS Survey	1	Baik
86	Handy Talky (HT)	12	Baik
87	Headphone Distributor	1	Baik
88	Jam Mekanis	2	Baik
89	Seterika	4	Baik
90	Stapler Tembak	7	Baik
91	Taplak Meja	30	Baik
92	Tabung Gas	8	Baik
93	Tangga	10	Baik
94	Telephone (PABX)	2	Baik
95	Tiang Bendera	1	Baik
96	Troli Kantor	2	Baik
97	Unit Power Supply	1	Baik
98	Voltage Regulator	1	Baik
99	Water Filter	1	Baik
100	Unit Power Supply	1	Baik
	Jaringan Listrik dan Air		
101	JARINGAN LISTRIK	1	Baik
102	Jaringan Lampu Hias	1	Baik
103	Jaringan Pipa Dinas Pipa Baja	1	Baik
	Jalan		
104	Jalan Kabupaten Lokal (pengaspalan depan pendopo)	1	Baik
	Mebelair		
105	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	7	Baik
106	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	3	Baik
107	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	24	Baik
108	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	10	Baik
109	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	2	Baik
110	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	Baik
111	Kursi Rapat Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	14	Baik
112	Kursi Tamu di Ruangan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	Baik
113	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	261	Baik
114	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	4	Baik
115	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	2	Baik
116	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	4	Baik
117	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	75	Baik
118	Lemari Besi/Metal	3	Baik
119	Lemari Kaca	5	Baik
120	Lemari Kayu	45	Baik
121	Lemari Makan	3	Baik
122	Locker	2	Baik

123	Meja Makan Kayu	6	Baik
124	Kursi/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil	2	Baik
125	Buffet Kayu	2	Baik
126	Meja Kerja Kayu	70	Baik
127	Meja Podium	2	Baik
128	Meja 1/2 Biro	2	Baik
129	Meja Rias	11	Baik
130	Meja Potong	3	Baik
131	Meja Resepsionis	4	Baik
132	Meja Bundar	11	Baik
133	Meja Tambahan	6	Baik
134	Meja Kerja Pejabat Eselon II	6	Baik
135	Meja Kerja Pejabat Eselon III	15	Baik
136	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	Baik
137	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	1	Baik
138	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	11	Baik
139	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	Baik
140	Meja Rapat Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	17	Baik
141	Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	3	Baik
142	Meja Rapat	62	Baik
143	Meja Panjang	19	Baik
144	Sofa	21	Baik
145	Sketsel	3	Baik
146	Tempat Tidur Kayu	43	Baik
	Komputer dan Kelengkapannya		
147	Mainframe (Komputer Jaringan)	2	Baik
148	P.C Unit	76	Baik
149	Note Book	107	Baik
150	Lap Top	9	Baik
151	Mini Komputer	3	Baik
152	CPU (Peralatan Mainframe)	1	Baik
153	LCD Projector/Infocus	32	Baik
154	LCD Monitor	1	Baik
155	Layar Film/Projector	14	Baik
156	Modem	1	Baik
157	Monitor	3	Baik
158	Printer (Peralatan Personal Komputer)	102	Baik
159	Kelengkapan Komputer	2	Baik
160	Scanner (peralatan personal komputer)	2	Baik
161	External/ Portable Hardisk	3	Baik
162	Webcam	3	Baik
	Kendaraan Bermotor		
163	Kendaraan Bermotor Roda 4	34	Baik
164	Kendaraan Bermotor Roda 2	57	Baik
	Tanah		
165	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	1	Baik

166	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1	Baik
167	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2	Baik
168	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	Baik
169	Tanah Danau/Situ/Embung	1	Baik
170	Tanah Untuk Jalan Nasional	2	Baik
171	Tanah Untuk Jalan Propinsi	2	Baik
172	Tanah Untuk Jalan Desa	1	Baik
173	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	3	Baik
174	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1	Baik
175	Tanah Untuk Taman Kota	1	Baik
176	Tanah Bangunan Garasi/Pool	1	Baik

Sumber: Bagian Umum (Juli, 2021)

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

2.3.1. Capaian Kinerja Tahun 2016-2021

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021, maka tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan pada periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel T-2.3.1
Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian					Keterangan	
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD			v	> B	> B	> B	> B	> B	> B	> B	> B	> B	> B	100	100	100	100	100		
2	Persentase kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase kebijakan pemerintahan umum yang diterbitkan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	prosentase regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa				26,32	42,11	63,16	84,21	100	26,32	42,11	42,11	42,11	42,11	100%	100%	67%	50%	42%	Urusan ditangani Pemes	
5	Ketepatan waktu penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah				< 90 hari	< 90 hari	< 90 hari	< 90 hari	< 90 hari	< 90 hari	< 90 hari	< 90 hari	< 90 hari	< 90 hari	100	100	100	100	100		
6	Persentase tertib administrasi pembangunan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase fasilitasi pengadaan barang dan jasa melalui ULP				60	70	80	90	100	60	70	80	90	100	100%	100%	100%	100%	100%		
8	Persentase kebijakan bidang perekonomian yang diterbitkan				45,95	59,46	72,97	86,49	100	45,95	59,46	72,97	86,49	100	100%	100%	100%	100%	100%		
9	Persentase kebijakan bidang sumber daya alam yang diterbitkan				42,86	57,14	71,43	85,71	100	42,86	57,14	71,43	85,71	100	100%	100%	100%	100%	100%		
10	Cakupan perjanjian kerjasama yang ditangani				60	70	80	90	100	60	70	80	90	100	100%	100%	100%	100%	100%		

11	Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang diterbitkan				42,86	57,14	71,43	85,71	100	42,86	57,14	71,43	85,71	100	100%	100%	100%	100%	100%
12	Jumlah kejadian terkait konflik keagamaan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
13	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan				63,72	72,79	81,86	90,93	100	63,72	72,79	81,86	90,93	100	100%	100%	100%	100%	100%
14	Keterpaduan program pemerintah				200 kali	225 kali	240 kali	245 kali	250 kali	200 kali	225 kali	240 kali	245 kali	250 kali	100	100	100	100	100
15	Persentase PD yang menerapkan SOP				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase penyampaian informasi tentang cukai kepada masyarakat dan/ pemangku kepentingan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18	Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Tingkat disiplin aparatur				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten meningkat tiap tahun, Renstra 2016-2021 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2016-2021. Sekretariat Daerah berkomitmen terhadap capaian kinerja yang menjadi tanggung jawab guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021

Selain kinerja pelayanan yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional, administrasi dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk membangun Kabupaten Pacitan. Adapun perbandingan anggaran dan realisasinya di Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel II.3.2
Perbandingan Anggaran dan Realisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021

Uraian Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Realisasi dengan Pagu Anggaran					Rata Rata	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	12.072.845.443	9.189.380.427	9.189.380.427	9.684.514.459	35.858.409.419	11.767.800.155	9.062.849.062	9.062.849.062	9.548.317.923	9.368.025.447	97,47%	98,62%	98,62%	98,59%	26,13%	10.034.030.189	15.980.421.183
Belanja Langsung	13.560.965.713	15.788.512.600	15.788.512.600	14.599.080.361	-	12.917.912.335	14.890.726.100	14.890.726.100	12.399.969.906	-	95,26%	94,31%	94,31%	84,94%		14.934.267.819	11.544.026.390
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.367.489.018	4.553.504.000	4.553.504.000	8.218.878.100		4.023.588.639	4.388.401.394	4.388.401.394	7.006.918.927		92,13%	96,37%	96,37%	85,25%		5.423.343.780	4.331.471.525
Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	4.260.135.018	4.475.755.000	4.475.755.000	4.005.648.840		3.919.850.089	4.312.077.394	4.312.077.394	3.337.525.173		92,01%	96,34%	96,34%	83,32%		4.304.323.465	3.239.289.710
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	107.354.000	77.749.000	77.749.000	47.030.000		103.738.550	76.324.000	76.324.000	46.016.300		96,63%	98,17%	98,17%	97,84%		77.470.500	50.632.000
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	211.546.500	337.000.000	337.000.000	212.562.400		208.127.825	328.015.225	328.015.225	211.353.600		98,38%	97,33%	97,33%	99,43%		274.527.225	221.640.600
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	1.587.600.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.103.950.000		1.267.320.518	1.373.568.312	1.373.568.312	715.200.540		79,83%	98,11%	98,11%	64,79%		1.372.887.500	975.987.500
Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	2.266.904.000	2.690.500.000	2.690.500.000	2.826.586.860		2.125.603.689	2.616.153.343	2.616.153.343	2.673.754.589		93,77%	97,24%	97,24%	94,59%		2.618.622.715	2.051.896.715
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	84.996.000	50.000.000	50.000.000	23.100.000		84.289.090	48.459.090	48.459.090	23.068.725		99,17%	96,92%	96,92%	99,86%		52.024.000	30.775.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.569.444.000	1.537.000.000	1.537.000.000	1.352.710.080		1.479.796.271	1.371.619.423	1.371.619.423	646.657.785		94,29%	89,24%	89,24%	47,80%		1.499.038.520	1.106.677.520
Kegiatan : Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	498.692.000	95.000.000	95.000.000	873.531.480		478.479.500	93.400.000	93.400.000	233.065.500		95,95%	98,32%	98,32%	26,68%		390.555.870	265.882.870
Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung kantor	375.286.000	255.000.000	255.000.000	304.198.600		369.253.100	248.978.800	248.978.800	295.763.800		98,39%	97,64%	97,64%	97,23%		297.371.150	203.549.650
Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor	92.638.000	521.000.000	521.000.000	174.980.000		85.307.750	470.670.000	470.670.000	117.828.485		92,09%	90,34%	90,34%	67,34%		327.404.500	304.245.000
Kegiatan : Pengadaan mebeleur	347.630.000	406.000.000	406.000.000			339.278.500	398.697.500	398.697.500			97,60%	98,20%	98,20%			289.907.500	203.000.000
Kegiatan : Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan Persandian dan Peningkatan Kapasitas Personil Persandian	255.198.000	260.000.000	260.000.000			207.477.421	159.873.123	159.873.123			81,30%	61,49%	61,49%			193.799.500	130.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	244.883.875	190.225.000	190.225.000	-		242.369.700	186.565.900	186.565.900	-		98,97%	98,08%	98,08%			156.333.469	95.112.500
Peningkatan Kapasitas Aparatur	244.883.875	190.225.000	190.225.000	-		242.369.700	186.565.900	186.565.900	-		98,97%	98,08%	98,08%	0		156.333.469	95.112.500

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	199.479.500	349.450.000	349.450.000	143.351.800		196.142.125	338.914.175	338.914.175	123.020.850		98,33%	96,99%	96,99%	85,82%		260.432.825	210.562.950
Penguatan Reformasi Birokrasi	63.450.500	59.700.000	59.700.000	49.280.500		62.445.725	59.103.300	59.103.300	39.203.650		98,42%	99,00%	99,00%	79,55%		58.032.750	42.170.125
Fasilitasi Pelaksanaan Gelar Budaya Kerja	84.437.750	50.000.000	50.000.000	-		83.183.200	44.313.550	44.313.550	-		98,51%	88,63%	88,63%			46.109.438	25.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemkab	199.479.500	239.750.000	239.750.000	94.071.300		196.142.125	235.497.325	235.497.325	83.817.200		98,33%	98,23%	98,23%	89,10%		193.262.700	143.392.825
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	1.664.678.500	1.785.595.000	1.785.595.000	1.268.107.300		1.657.459.410	1.754.030.275	1.754.030.275	1.235.616.940		99,57%	98,23%	98,23%	97,44%		1.625.993.950	1.209.824.325
Pelayanan Keprotokolan	153.140.000	232.749.000	232.749.000	137.692.000		153.015.000	232.408.125	232.408.125	135.008.500		99,92%	99,85%	99,85%	98,05%		189.082.500	150.797.500
Pelayanan Kehumasan	1.461.538.500	1.502.846.000	1.502.846.000	691.410.300		1.454.444.410	1.471.640.900	1.471.640.900	673.372.970		99,51%	97,92%	97,92%	97,39%		1.289.660.200	924.275.575
Pelayanan Dokumentasi Pimpinan				389.005.000					387.799.470					99,69%		97.251.250	97.251.250
Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur (BK)	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000		50.000.000	49.981.250	49.981.250	39.436.000		100,00%	99,96%	99,96%	78,87%		50.000.000	37.500.000
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	301.708.000	304.955.000	304.955.000	72.004.000		272.292.075	248.685.415	248.685.415	64.976.490		90,25%	81,55%	81,55%	90,24%		245.905.500	170.478.500
Kegiatan : Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	131.242.000	131.640.000	131.640.000	47.004.000		110.854.525	109.189.163	109.189.163	43.099.050		84,47%	82,95%	82,95%	91,69%		110.381.500	77.571.000
Kegiatan : Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	170.466.000	173.315.000	173.315.000	25.000.000		161.437.550	139.496.252	139.496.252	21.877.440		94,70%	80,49%	80,49%	87,51%		135.524.000	92.907.500
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	671.569.187	926.000.000	926.000.000	313.307.800		667.934.470	903.853.707	903.853.707	289.880.875		99,46%	97,61%	97,61%	92,52%		709.219.247	541.326.950
Kegiatan : Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	67.802.687	85.000.000	85.000.000	1.425.000		67.732.000	84.133.540	84.133.540	1.425.000		99,90%	98,98%	98,98%	100,00%		59.806.922	42.856.250
Kegiatan : Penyusunan Produk Hukum Daerah	232.183.250	330.000.000	330.000.000	128.441.800		230.354.810	328.229.095	328.229.095	128.043.700		99,21%	99,46%	99,46%	99,69%		255.156.263	197.110.450
Kegiatan : Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum, dan Penyelesaian Perkara Hukum	128.852.250	301.000.000	301.000.000	120.300.000		127.341.670	283.908.298	283.908.298	97.310.875		98,83%	94,32%	94,32%	80,89%		212.788.063	180.575.000
Kegiatan : Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (SJDIH)	242.731.000	210.000.000	210.000.000	63.141.000		242.505.990	207.582.774	207.582.774	63.101.300		99,91%	98,85%	98,85%	99,94%		181.468.000	120.785.250
Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	238.137.012	237.600.000	237.600.000	208.995.000		234.306.575	235.980.600	235.980.600	206.793.250		98,39%	99,32%	99,32%	98,95%		230.583.003	171.048.750
Peningkatan pelayanan public	238.137.012	237.600.000	237.600.000	208.995.000		234.306.575	235.980.600	235.980.600	206.793.250		98,39%	99,32%	99,32%	98,95%		230.583.003	171.048.750
Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara	22.912.500	42.535.000	42.535.000	3.926.000		20.796.950	41.112.250	41.112.250	3.926.000		90,77%	96,66%	96,66%	100,00%		27.977.125	22.249.000

Monitoring, Evaluasi dan Analisis Kelembagaan Pemerintah Daerah	62.377.000	79.900.000	79.900.000	47.159.400		56.772.000	77.919.200	77.919.200	46.557.900		91,01%	97,52%	97,52%	98,72%		67.334.100	51.739.850
Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas Unit Kerja Kelembagaan	134.845.500	120.350.000	120.350.000	37.046.900		126.093.750	117.583.600	117.583.600	35.693.350		93,51%	97,70%	97,70%	96,35%		103.148.100	69.436.725
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	695.717.000	659.650.000	659.650.000	455.182.394		686.015.800	606.835.000	606.835.000	447.154.744		98,61%	91,99%	91,99%	98,24%		617.549.849	443.620.599
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan	526.838.000	563.000.000	563.000.000	409.366.994		518.469.100	553.700.000	553.700.000	403.479.344		98,41%	98,35%	98,35%	98,56%		515.551.249	383.841.749
Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan	168.879.000	96.650.000	96.650.000	45.815.400		167.546.700	53.135.000	53.135.000	43.675.400		99,21%	54,98%	54,98%	95,33%		101.998.600	59.778.850
Program Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Bidang Pembangunan	777.822.562	1.399.000.000	1.399.000.000	1.070.481.602		758.909.270	1.364.219.863	1.364.219.863	1.042.301.504		97,57%	97,51%	97,51%	97,37%		1.161.576.041	967.120.401
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	133.408.875	260.000.000	260.000.000	111.004.672		126.415.000	252.090.600	252.090.600	105.256.684		94,76%	96,96%	96,96%	94,82%		191.103.387	157.751.168
Peningkatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	85.922.750	144.000.000	144.000.000	42.594.800		83.642.000	131.603.000	131.603.000	40.208.200		97,35%	91,39%	91,39%	94,40%		104.129.388	82.648.700
Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	81.456.375	140.000.000	140.000.000	42.327.500		78.388.200	125.936.652	125.936.652	36.990.990		96,23%	89,95%	89,95%	87,39%		100.945.969	80.581.875
Pelaksanaan Pemilihan Barang dan Jasa Melalui Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa (ULP)	340.534.562	855.000.000	855.000.000	415.767.300		340.383.550	854.589.611	854.589.611	412.016.300		99,96%	99,95%	99,95%	99,10%		616.575.466	531.441.825
Sinkronisasi dan penyebarluasan strategi pengadaan barang dan jasa	136.500.000			18.774.780		130.080.520			18.324.780		95,30%			97,60%		38.818.695	4.693.695
Pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa melalui implementasi e-procurement				35.000.000					34.980.000					99,94%		8.750.000	8.750.000
Penguatan kelembagaan dan SDM pengadaan barang dan jasa				137.847.900					137.847.900					100,00%		34.461.975	34.461.975
Penyusunan Standar Satuan Harga dan Analisis Biaya				219.583.150					218.858.150					99,67%		54.895.788	54.895.788
Penyusunan Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah				47.581.500					37.818.500					79,48%		11.895.375	11.895.375
Program Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Monitoring Bidang Perekonomian	511.243.500	710.000.000	710.000.000	200.427.058		437.632.775	627.351.065	627.351.065	190.128.058		85,60%	88,36%	88,36%	94,86%		532.917.640	405.106.765

Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Perekonomian	124.372.750	200.000.000	200.000.000	26.960.000		119.275.550	178.620.400	178.620.400	23.302.000		95,90%	89,31%	89,31%	86,43%		137.833.188	106.740.000
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	65.686.750	105.000.000	105.000.000	27.009.241		49.663.950	95.217.100	95.217.100	26.546.241		75,61%	90,68%	90,68%	98,29%		75.673.998	59.252.310
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri, Perdagangan	126.021.250	160.000.000	160.000.000	32.850.594		105.354.050	127.586.750	127.586.750	31.750.594		83,60%	79,74%	79,74%	96,65%		119.717.961	88.212.649
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Penanaman Modal, BUMD dan Perbankan	125.704.375	160.000.000	160.000.000	95.207.223		100.576.525	146.394.800	146.394.800	92.564.223		80,01%	91,50%	91,50%	97,22%		135.227.900	103.801.806
Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	69.458.375	85.000.000	85.000.000	18.400.000		62.762.700	79.532.015	79.532.015	15.965.000		90,36%	93,57%	93,57%	86,77%		64.464.594	47.100.000
Program Koordinasi, Fasilitasi, Dan Monitoring Bidang Kesejahteraan Rakyat	449.928.622	516.785.000	516.785.000	331.796.022		430.672.035	493.937.675	493.937.675	322.884.822		95,72%	95,58%	95,58%	97,31%		453.823.661	341.341.506
Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	243.020.750	232.285.000	232.285.000	220.750.472		235.260.500	230.158.650	230.158.650	216.828.422		96,81%	99,08%	99,08%	98,22%		232.085.306	171.330.118
Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	113.739.500	115.000.000	115.000.000	68.539.050		110.689.385	107.147.875	107.147.875	66.387.450		97,32%	93,17%	93,17%	96,86%		103.069.638	74.634.763
Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	93.168.372	169.500.000	169.500.000	42.506.500		84.722.150	156.631.150	156.631.150	39.668.950		90,93%	92,41%	92,41%	93,32%		118.668.718	95.376.625
Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	1.155.305.312	1.716.883.600	1.716.883.600	524.715.000		1.136.281.023	1.518.795.594	1.518.795.594	421.809.350		98,35%	88,46%	88,46%	80,39%		1.278.446.878	989.620.550
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1.114.817.250	1.658.508.600	1.658.508.600	41.441.500		1.101.872.673	1.479.727.394	1.479.727.394	39.457.700		98,84%	89,22%	89,22%	95,21%		1.118.318.988	839.614.675
Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	40.488.062	58.375.000	58.375.000	483.273.500		34.408.350	39.068.200	39.068.200	382.351.650		84,98%	66,93%	66,93%	79,12%		160.127.891	150.005.875
Program Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan	463.559.625	651.865.000	651.865.000	189.124.205		456.149.667	634.489.764	634.489.764	179.332.905		98,40%	97,33%	97,33%	94,82%		489.103.458	373.213.551

Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Administrasi Pemerintahan	194.214.125	243.664.000	243.664.000	89.430.000		193.704.000	235.675.800	235.675.800	89.047.700		99,74%	96,72%	96,72%	99,57%		192.743.031	144.189.500
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	164.364.000	225.600.000	225.600.000	37.392.600		161.101.950	221.526.877	221.526.877	33.498.600		98,02%	98,19%	98,19%	89,59%		163.239.150	122.148.150
Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan Desa	104.981.500	182.601.000	182.601.000	62.301.605		101.343.717	177.287.087	177.287.087	56.786.605		96,53%	97,09%	97,09%	91,15%		133.121.276	106.875.901
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		238.362.500	217.046.250	217.046.250	222.493.406		95,35%	86,82%	86,82%	89,00%		250.000.000	187.500.000
Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		238.362.500	217.046.250	217.046.250	222.493.406		95,35%	86,82%	86,82%	89,00%		250.000.000	187.500.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.964.679.419				8.935.769.268						42,62%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					80.000.000				16.870.000						21,09%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					20.000.000				1.881.000						9,41%		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					28.000.000				14.989.000						53,53%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					17.000.000				-						0,00%		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					15.000.000				-						0,00%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11.755.548.568				2.446.526.195						20,81%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					10.987.468.568				5.335.990.082						48,56%		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					768.080.000				382.073.085						49,74%		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					66.880.000				14.723.000						22,01%		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					20.000.000				14.723.000						73,62%		

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				46.880.000						-					0,00%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.940.992.800						979.479.654					33,30%		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				496.400.000						171.248.825					34,50%		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				454.864.000						92.474.200					20,33%		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				489.600.000						305.774.525					62,45%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.500.128.800						409.982.104					27,33%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				692.720.000,00						251.391.887					36,29%		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				692.720.000						251.391.887					36,29%		
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional										-					#DIV/0!		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				610.800.000						212.605.800					34,81%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				533.600.000						167.912.100					31,47%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				77.200.000						44.693.700					57,89%		
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.373.354.051						433.247.092					31,55%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				773.354.051						110.712.092					14,32%		
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				600.000.000						271.385.000					45,23%		
Fasilitas Kerumahtangga Sekretariat Daerah				1.708.000.000						925.244.168					54,17%		
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				1.337.897.000						738.517.883					55,20%		
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				270.103.000						151.852.425					56,22%		

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				100.000.000						34.873.860					34,87%		
Penataan Organisasi				1.000.000.000						138.296.700					13,83%		
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				250.000.000						34.895.350					13,96%		
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				450.000.000						48.898.100					10,87%		
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				300.000.000						54.503.250					18,17%		
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				736.384.000						245.847.800					33,39%		
Fasilitasi Keprotokolan				212.947.000						77.989.500					36,62%		
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				220.651.000						70.262.000					31,84%		
Pendokumentasian Tugas Pimpinan				302.786.000						97.596.300					32,23%		
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				12.689.974.000											0,00%		
Administrasi Tata Pemerintahan				804.548.000						259.248.212					32,22%		
Penataan Administrasi Pemerintahan				208.775.000						-					0,00%		
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				260.000.000											0,00%		
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				335.773.000						259.248.212					77,21%		
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				11.033.130.000						94.812.750					0,86%		
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				8.001.730.000						56.130.750					0,70%		
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				351.970.000						22.346.000					6,35%		
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat				2.679.430.000						16.336.000					0,61%		
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				682.296.000						293.953.850					43,08%		
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				260.000.000						147.441.300					56,71%		
Fasilitasi Bantuan Hukum				227.296.000						37.960.000					16,70%		
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				195.000.000						108.552.550					55,67%		
Fasilitasi Kerjasama Daerah				170.000.000						22.410.000					13,18%		
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				90.000.000						22.410.000					24,90%		

Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama					80.000.000													0,00%
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					2.203.756.000					432.256.179								19,61%
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					420.860.000					42.495.770								10,10%
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					170.860.000					30.194.900								17,67%
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					130.000.000					3.296.000								2,54%
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil					120.000.000					9.004.870								7,50%
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					488.000.000					61.806.324								12,67%
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan					288.000.000					41.381.450								14,37%
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					100.000.000					8.375.124								8,38%
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					100.000.000					12.049.750								12,05%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					864.896.000					265.897.250								30,74%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					539.896.000					157.405.300								29,15%
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik					85.000.000					9.985.000								11,75%
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					240.000.000					98.506.950								41,04%
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					430.000.000					62.056.835								14,43%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan					290.000.000					42.566.605								14,68%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup					70.000.000					11.168.550								15,96%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air					70.000.000					8.321.680								11,89%
	25.633.811.156	24.977.893.027	24.977.893.027	24.283.594.820	35.858.409.419	24.685.712.490	23.953.575.162	23.953.575.162	21.948.287.829	10.087.411.384								

Dari table T-2.2 tersebut dapat dilihat bahwa rasio realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik karena rentang rasio antara 80.01% s/d 99.96%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, meliputi :

1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Sekretariat Daerah yang masih belum optimal. Kapasitas dan kompetensi SDM ada yang masih belum sesuai dengan bidang tugasnya di beberapa Bagian bisa mempengaruhi capaian kerjanya.
2. Masih adanya perbedaan persepsi tentang adanya *overlapping* tugas dan fungsi antara Bagian di lingkup Sekretariat Daerah dengan SKPD (dinas/lembaga teknis).
3. Sarana dan prasarana masih kurang, baik kualitas maupun kuantitasnya seperti gedung, komputer, kendaraan dinas serta sarana pendukung lainnya.
4. Alat Teknologi Informasi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari.
5. Penyediaan data dan informasi yang kurang baik sehingga pengukuran kinerja belum didukung data-data yang valid dan ini akan berpengaruh pada kualitas analisis capaian kinerja.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, meliputi :

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan;

2. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung eksistensi Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Sekretariat Daerah yang bertugas mengkoordinir SKPD di Kabupaten Pacitan mempunyai kedudukan yang strategis untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, melalui upaya koordinasi, konsolidasi dan kerjasama yang harmonis dengan pihak-pihak terkait.
4. Evaluasi kelembagaan memungkinkan untuk dilaksanakan sehingga tersusun penataan organisasi, personil dan sarana-prasarana sampai dipandang benar-benar sesuai dengan kebutuhan.
5. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM melalui mutasi, penambahan personil, maupun pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan PD senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi PD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi PD di masa lima tahun mendatang.

Di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan yang sedikit banyak mempengaruhi pencapaian indikator kinerja. Permasalahan tersebut adalah :

- 1) Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Sekretariat Daerah yang masih belum optimal. Kapasitas dan kompetensi SDM ada yang

masih belum sesuai dengan bidang tugasnya di beberapa Bagian bisa mempengaruhi capaian kerjanya.

- 2) Masih adanya perbedaan persepsi tentang adanya overlapping tugas dan fungsi antara Bagian di lingkup Sekretariat Daerah dengan PD (Dinas/lembaga teknis).
- 3) Beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan masih kurang, baik kualitas maupun kuantitasnya seperti komputer dan kendaraan dinas serta sarana pendukung lainnya.
- 4) Alat Teknologi Informasi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari.
- 5) Penyediaan data dan informasi yang kurang baik sehingga pengukuran kinerja belum didukung data-data yang valid dan ini akan berpengaruh pada kualitas analisis capaian kinerja.
- 6) Kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang belum sesuai dengan kondisi/keadaan terkini.

Apabila permasalahan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan disusun ke dalam matriks sebagai berikut :

Tabel T-3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Sumber Daya Manusia	Kurang baik kualitas dan kuantitas	Sesuai baik jumlah maupun kompetensi	Minimnya jumlah PNS, kompetensi rata-rata rendah		Capaian kinerja belum optimal
Uraian Tugas dan Fungsi	Masih ada overlapping	Tidak ada overlapping dengan PD	Uraian tugas dan fungsi di Perda dan Perbup kurang jelas	Multitafsir dengan PD	Ada kegiatan yang sama dengan PD
Sarana Prasarana	Masih kurang baik kualitas dan kuantitas	Sesuai kebutuhan	Anggaran terbatas	Banyak kegiatan luar yang memerlukan kendaraan dinas	Kegiatan luar terhambat

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Teknologi Informasi	Masih kurang optimal	Bisa mendukung kegiatan sehari-hari	Anggaran dan kemampuan SDM terbatas	Tantangan perkembangan global yang makin meningkat	Pemanfaatan TI untuk mendukung kegiatan sehari-hari masih kurang, publikasi pemerintah daerah dengan TI masih kurang
Data dan Informasi	Kurang valid	Valid dan reliable	Pengumpulan dan pengolahan data masih kurang, SDM kurang sadar data		Pengukuran kinerja belum didukung data-data yang valid dan ini akan berpengaruh pada kualitas analisis capaian kinerja

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi dan program kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi PD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih, juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan PD. Dengan demikian isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih.

Penyusunan Rencana Strategis PD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Sekretariat

Daerah Kabupaten Pacitan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021.

Adapun rumusan visi Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 adalah :

“MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA dan BAHAGIA “

Visi adalah suatu kondisi yang diharapkan dan yang ingin dicapai pada masa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan, visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan.

Sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa

Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Wisata dan Agraris yang Didukung oleh Sektor Unggulan Lainnya

Misi 4 : Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani

Misi tersebut merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Sekretariat Daerah. Hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke 4 : **Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani** Pada misi keempat ini, yang menjadi tugas Sekretariat Daerah berperan dalam beberapa sasaran dan mempunyai tugas pokok sebagai penyusun kebijakan dan pengkoordinasian perangkat daerah (PD).

Selain telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah diuraikan di atas, Sekretariat Daerah juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 dalam bentuk program prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat
3. Program Perekonomian dan Pembangunan

Tabel T-3.2
Telaah Tujuan dan Sasaran PD terhadap Visi Misi Bupati

Visi Kabupaten Pacitan Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA							
Misi 4 Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani							
Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program	Identifikasi Masalah	Faktor yang Mempengaruhi		
					Pendukung	Penghambat	
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel	1	Score Nilai SAKIP Daerah				
1.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1.1.1	Score Nilai LPPD	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	% realisasi Kebijakan Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana.	Kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan daerah yang belum sesuai dengan kondisi/keadaan terkini menyebabkan pelaksanaan tugas sering terhambat.	
		1.1.2	Score Nilai Indek Tata Kelola PBJ	Program Perekonomian dan Pembangunan	% realisasi Kebijakan Bidang Perkonomian dan Pembangunan yang terlaksana.	Alat Teknologi Informasi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari.	
1.2	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah	1.2.1	Score Nilai SAKIP PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota	% realisasi Kebijakan Bidang Administrasi Umum yang terlaksana.	1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Sekretariat Daerah yang masih belum optimal. Kapasitas dan kompetensi SDM ada yang masih belum sesuai dengan bidang tugasnya 2. Penyediaan data dan informasi yang kurang baik sehingga pengukuran kinerja belum didukung data-data yang valid dan ini akan berpengaruh pada kualitas analisis capaian kinerja 3. Beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan masih kurang, baik kualitas maupun kuantitasnya seperti gedung, komputer dan kendaraan dinas serta sarana pendukung lainnya.	
		1.2.2	Score Nilai IKM PD				

3.3 Telaah Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah

-

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

-

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari visi dan misi Kepala Daerah, maka isu-isu strategis yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

1. Kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan daerah yang belum sesuai dengan kondisi/keadaan terkini menyebabkan pelaksanaan tugas sering terhambat.
2. Masih adanya perbedaan persepsi tentang adanya *overlapping* tugas dan fungsi antara Bagian di lingkup Sekretariat Daerah dengan PD.
3. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Sekretariat Daerah yang masih belum optimal. Kapasitas dan kompetensi SDM ada yang masih belum sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Penyediaan data dan informasi yang kurang baik sehingga pengukuran kinerja belum didukung data-data yang valid dan ini akan berpengaruh pada kualitas analisis capaian kinerja.
5. Alat Teknologi Informasi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari.
6. Beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan masih kurang, baik kualitas maupun kuantitasnya seperti gedung, komputer dan kendaraan dinas serta sarana pendukung lainnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

4.1.1 Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi yang berhubungan dengan layanan dan tugas fungsi PD. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi PD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah stratejik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Maka tujuan yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 adalah ” *Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel*”

4.1.2. Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh perangkat Daerah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan pada tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
2. Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah

Keterkaitan (interelasi) tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan selanjutnya disusun dalam tabel T-4.1 berikut :

Tabel T-4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

TUJUAN										SASARAN									
TUJUAN	INDIKATOR	Target								URAIAN	INDIKATOR	TARGET							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022			2023	2024	2025	2026				
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel	1	Score Nilai SAKIP Daerah	72	75	77	79	82	84	1.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1.1.1	Score Nilai LPPD	2.6500	2.7000	2.7500	2.8000	2.8500	2.90
		2	Score Nilai IKM Daerah	83	83.5	84	84.5	85	85.5			1.1.2	Score Nilai Indeks Tata Kelola PBJ	45	50	55	60	70	75
										1.2	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah	1.2.1	Score Nilai Sakip PD	70	72	74	76	78	80
												1.2.2	Score Nilai IKM PD	83	83.5	84	84.5	85	85.5

4.1.3. Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, pimpinan menurunkan tanggung jawab atau sebagian tanggung jawab yang direncanakan ke bawahan, dikendalikan, dimonitor dan diukur/ dinilai dan apa yang diturunkan harus dipastikan dan diyakinkan akan menghasilkan apa yang diinginkan dan akan kembali ke atasan .

Cascading Kinerja Sekretariat Daerah adalah penjabaran tujuan yang diturunkan dari Sekda ke Asisten kemudian ke masing - masing Bagian dengan tujuan untuk mendapatkan hasil kinerja yang runtut dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya.

Adapun Cascading Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dapat dilihat dari Tabel berikut :

Tabel T-4.2
CASCADING SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel											
Indikator Tujuan	Nilai SAKIP Daerah						Nilai IKM Daerah					
Sasaran	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan						Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah					
Indikator Sasaran	Nilai LPPD			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa			Score Nilai Sakip PD			Nilai IKM PD		
Program	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Program Perekonomian dan Pembangunan			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota					
Indikator Program	% kebijakan dibidang administrasi pemerintahan, admnistrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah yang terlaksana	% kebijakan dibidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	% kebijakan dibidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana.	% kebijakan dibidang Perekonomian dan SDA yang terlaksana.	% kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan PBJ secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	% kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program pembangunan dan evaluasi pelaporan yang terlaksana	% kebijakan dibidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana	% kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi yang terlaksana	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	% tata kelola keuangan yang terlaksana	% kebijakan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana	Nilai IKM PD

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Sekretariat Daerah adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan PD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana PD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel T-5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia

Misi : 4. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
TUJUAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		
1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel	1. Score Nilai SAKIP Daerah Kabupaten Score Nilai 2. IKM Kabupaten	1.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1.1.1 Score Nilai LPPD	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan Kesejahteraan Rakyat melalui monitoring dan evaluasi serta penyusunan kebijakan pemerintahan umum	Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan kebijakan dan melaksanakan kerjasama bidang pemerintahan dan pembangunan
			1.1.2 Score Nilai Indeks Tata Kelola PBJ	Peningkatan kinerja bidang perekonomian, SDA, pembangunan dan intensifikasi pelaksanaan UKPBJ	Peningkatan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara konsisten bidang perekonomian, SDA, Pembangunan dan penerapan PBJ sesuai regulasi yang berlaku
		1.2 Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah	1.2.1 Score Nilai Sakip PD	Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Peningkatan dan implementasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
			1.2.2 Score Nilai IKM PD	Peningkatan kualitas layanan PD	Peningkatan pelayanan bidang kelembagaan, analisis jabatan, tata laksana, protokol, komunikasi pimpinan dan kebutuhan dasar Setda

Tabel T-5.2

ARAH KEBIJAKAN

No.	Arah Kebijakan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan kebijakan dan melaksanakan kerjasama bidang pemerintahan dan pembangunan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Peningkatan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara konsisten bidang perekonomian, SDA, Pembangunan dan penerapan PBJ sesuai regulasi yang berlaku	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Peningkatan dan implementasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Peningkatan pelayanan bidang kelembagaan, analisis jabatan, tata laksana, protokol, komunikasi pimpinan dan kebutuhan dasar Setda	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan untuk menghadapi tantangan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan Kesejahteraan Rakyat melalui monitoring dan evaluasi serta penyusunan kebijakan pemerintahan umum
2. Peningkatan kinerja bidang perekonomian, SDA, pembangunan dan intensifikasi pelaksanaan UKPBJ
3. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
4. Peningkatan kualitas layanan PD

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini adalah :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan kebijakan dan melaksanakan kerjasama bidang pemerintahan dan pembangunan
2. Peningkatan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara konsisten bidang perekonomian, SDA, Pembangunan dan penerapan PBJ sesuai regulasi yang berlaku Implementasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
3. Peningkatan dan implementasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
4. Peningkatan pelayanan bidang kelembagaan, analisis jabatan, tata laksana, protokol, komunikasi pimpinan dan kebutuhan dasar Setda

Tabel T-5.3

Program Politik dan Program Nomenklatur

No	Program Politik	Program Nomenklatur			Unit Kerja		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Bag. Pemerintahan dan Kerjasama		
					Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bag. Pemerintahan dan Kerjasama	
					Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bag. Pemerintahan dan Kerjasama	
				Fasilitasi Kerjasama Daerah	Bag. Pemerintahan dan Kerjasama		
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bag. KESRA	
						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Bag. KESRA
						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Bag. KESRA
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Bag. Hukum	
						Fasilitasi Bantuan Hukum	Bag. Hukum
						Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Bag. Hukum
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Bag. Perekonomian	
						Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Bag. Perekonomian
						Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Bag. Perekonomian
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Bag. Perekonomian	

		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Bag. Perekonomian
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bag. PBJ
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Bag. PBJ
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bag. PBJ
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Bag. Pembangunan
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bag. Pembangunan
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Bag. Pembangunan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian organisasi
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian organisasi
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian organisasi
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	Bagian Humas dan Protokol
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Bagian Humas dan Protokol
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Bagian Humas dan Protokol
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bag. Umum
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bag. Perekonomian
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bag. Umum
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bag. Umum
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Bag. Umum
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bag. Umum
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bag. Umum
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bag. Umum

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bag. Umum
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bag. Umum
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bag. Umum
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bag. Umum
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bag. Umum
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bag. Umum
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Bag. Umum
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Bag. Umum
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bag. Umum
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bag. Umum
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bag. Umum
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bag. Umum
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bag. Umum
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bag. Umum

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, rincian tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan, dapat bersifat jangka panjang dan menengah antara 3-5 tahun atau bersifat tahunan saja. Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Program PD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per-PD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan PD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah PD.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan PD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Program-program Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 ada 3 (tiga) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat
3. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2016–2021 terurai pada tabel T-6.1 berikut ini :

Tabel T-6
SASARAN DAN PROGRAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

		SASARAN								PROGRAM								
URAIAN		INDIKATOR		TARGET						URAIAN	INDIKATOR	TARGET						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1.1.1	Score Nilai LPPD	26.500	27.000	27.500	28.000	28.500	29.000	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	% kebijakan dibidang administrasi pemerintahan, admnistrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				% kebijakan dibidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%		100%							
				% kebijakan dibidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana.	100%	100%	100%	100%	100%		100%							
		1.1.2	Score Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	45	50	55	60	70	75		Program Perekonomian dan Pembangunan	% kebijakan dibidang Perekonomian dan SDA yang terlaksana.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				% kebijakan dibidang pengelolaan PBJ, pengelolaan layanan PBJ secara elektronik, pembinaan dan advokasi PBJ yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%			100%						

											% kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program pembangunan dan evaluasi pelaporan yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah	1.2.1	Score Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	72	74	76	78	80	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	>B	>B	>B	>B	>B	>B
											% tata kelola keuangan yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.2.2	Score Nilai IKM Perangkat Daerah							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota	% kebijakan dibidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
											% kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
											% kebijakan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%

											Nilai IKM Perangkat Daerah	83	83,5	84	84,5	85	85,5
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	----	------	----	------	----	------

Tabel T-6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

TUJUAN	Sasaran	Kode, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	TARGET												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		UNIT KERJA						
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp							
					Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp									
1	2	3					4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel		Score Nilai SAKIP Daerah	Nilai	72		75		77		79		82		84		84								
	1.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan		1.1.1 Nilai LPPD	Nilai	26.500		27.000		27.500		28.000		28.500		29.000		29.000								
			1.1.2 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	45		50		55		60		70		75		75								
		4 1 2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	8.245.880.000	100	9.070.468.000	100	9.977.514.800	100	10.975.266.280	100	12.072.792.908	100	13.280.072.199	100	55.376.114.187							
			% kebijakan dibidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100								

		4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	% fasilitasi dan koordinasi bidang KESRA	%	100	6.291.880.000	100	6.921.068.000	100	7.613.174.800	100	8.374.492.280	100	9.211.941.508	100	10.133.135.659	100	42.253.812.247	
		4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	% fasilitasi dan koordinasi bidang bina mental spritual	%	100	4.905.880.000	100	5.396.468.000	100	5.936.114.800	100	6.529.726.280	100	7.182.698.908	100	7.900.968.799	100	32.945.976.787	
								Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi bidang mental spritual	orang	7000		7000		7000		7000		7000		7000		3500		
		4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	% Fasilitasi pelaksanaan pembangunan bidang Kesehatan, pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana	%	100	300.000.000	100	330.000.000	100	363.000.000	100	399.300.000	100	439.230.000	100	483.153.000	100	2.014.683.000	
								Jumlah penerima hibah	lembaga	550		550		550		550		550		550		2750		
								Monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah dan BK	laporan	550		550		550		550		550		550		2750		
		4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	% Fasilitasi pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga	%	100	1.086.000.000	100	1.194.600.000	100	1.314.060.000	100	1.445.466.000	100	1.590.012.600	100	1.749.013.860	100	7.293.152.460	
		4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Bidang hukum	% fasilitasi dan koordinasi Bidang hukum	%	100	900.000.000	100	990.000.000	100	1.089.000.000	100	1.197.900.000	100	1.317.690.000	100	1.449.459.000	100	6.044.049.000	
		4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum Perbup yang ditetapkan	Dok	70	400.000.000	70	440.000.000	70	484.000.000	70	532.400.000	70	585.640.000	70	644.204.000	350	2.686.244.000	
								Jumlah produk hukum Perda yang ditetapkan	Dok	8		8		8		8		8		8		40		
		4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	% Fasilitasi pertimbangan dan bantuan hukum	%	100	250.000.000	100	275.000.000	100	302.500.000	100	332.750.000	100	366.025.000	100	402.627.500	100	1.678.902.500	
								Jumlah peserta fasilitasi peraturan perundang-undangan	orang	100		100		100		100		100		100		500		
		4	1	2	2.03	3	Pendokumentasi an Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah keputusan bupati yang ditetapkan	dok	700	250.000.000	700	275.000.000	700	302.500.000	700	332.750.000	700	366.025.000	700	402.627.500	3500	1.678.902.500	
								% Produk hukum yang diupload di website SJDIH	%	100		100		100		100		100		100		100		
		4	1	3			Program Perekonomian dan Pembangunan	% kebijakan dibidang Perekonomian dan SDA yang terlaksana.	%	100	14.903.299.083	100	16.393.628.991	100	18.032.991.890	100	19.836.291.079	100	21.819.920.187	100	24.001.912.206	100	88.713.431.655	

			4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	% fasilitasi dan koordinasi bidang LPSE	%	100	300.000.000	100	330.000.000	100	363.000.000	100	399.300.000	100	439.230.000	100	483.153.000	100	531.468.300	
									Jumlah data penyedia yang terqualifikasi dalam SIKAP	penyedia	25		25		25		25		25		25		125		
									Stadarisasi LPSE	standar	5		5		5		5		5		5		25		
			4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	% fasilitasi dan koordinasi bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	%	100	700.000.000	100	770.000.000	100	847.000.000	100	931.700.000	100	1.024.870.000	100	1.127.357.000	100	1.240.092.700	
									Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan PBJ	orang	110		110		110		110		110		110		550		
									Jumlah monitoring pelaksanaan PBJ	PD	12		12		12		12		12		12		60		
									Laporan tata kelola Sanggah	dok	4		4		4		4		4		4		20		
									Tingkat kematangan UKPBJ	level	3		3		3		4		4		4		4		
			4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	% fasilitasi dan koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan	%	100	3.954.501.123	100	4.349.951.235	100	4.784.946.359	100	5.263.440.995	100	5.789.785.094	100	6.368.763.604	100	26.556.887.287	
			4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	% fasilitasi dan koordinasi bidang penyusunan program pembangunan	%	100	3.524.501.123	100	3.876.951.235	100	4.264.646.359	100	4.691.110.995	100	5.160.222.094	100	5.676.244.304	100	23.669.174.987	
									Jumlah dokumen SHS disusun	dok	3		3		3		3		3		3		15		
									Jumlah pedoman pelaksanaan pembangunan yang disusun	Perbup	1		1		1		1		1		1		5		
			4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah aplikasi pelaporan pelaksanaan pembangunan terintegrasi	paket	1	250.000.000	1	275.000.000	1	302.500.000	1	332.750.000	1	366.025.000	1	402.627.500	5	1.678.902.500	
									Jumlah kegiatan fisik konstruksi yang dimonitoring	paket	400		400		400		400		400		400		2000		
									Jumlah laporan fisik konstruksi dana APBD Propinsi dan APBN yang disusun	dok	4		4		4		4		4		4		20		
									Jumlah laporan kegiatan fisik konstruksi dan non konstruksi yang disusun	dok	20		20		20		20		20		20		100		
			4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah evaluasi serapan anggaran APBD yang disusun	dok	3	180.000.000	3	198.000.000	3	217.800.000	3	239.580.000	3	263.538.000	3	289.891.800	15	1.208.809.800	
									Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan APBD yang disusun	dok	12		12		12		12		12		12		60		

							Jumlah laporan tata kelola TEPPRA Kabupaten	dok	12		12		12		12		12		60				
		4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	% fasilitasi dan koordinasi Bidang SDA	%	100	2.100.000.000	100	2.310.000.000	100	2.541.000.000	100	2.795.100.000	100	3.074.610.000	100	3.382.071.000	100	14.102.781.000
		4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	% fasilitasi dan koordinasi bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	%	100	1.900.000.000	100	2.090.000.000	100	2.299.000.000	100	2.528.900.000	100	2.781.790.000	100	3.059.969.000	100	12.759.659.000
								% ketaatan program/kegiatan DBHCT terhadap ketentuan peraturan perundangan	%	100		100		100		100		100		100		100	
		4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	% fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang pertanian, kelautan dan perikanan	%	100	200.000.000	100	220.000.000	100	242.000.000	100	266.200.000	100	292.820.000	100	322.102.000	100	1.343.122.000
								% Fasilitasi pelaksanaan pembangunan bidang pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air	%	100		100		100		100		100		100		100	
	1.2	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah						1.2.1 Score Nilai SAKIP PD	Nilai	75		76		77		78		79		80		80	
								1.2.2 Score Nilai IKM PD	Nilai	83		83.5		84		84.5		85		85.5		85.5	
		4	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota	% kebijakan dibidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana	%	100	24.939.240.934	100	27.433.165.027	100	30.176.481.530	100	33.194.129.683	100	36.513.542.651	100	40.164.896.917	100	165.182.734.664
								% kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100	
								% Pemenuhan Kebutuhan Dasar Sekretariat Daerah	%	100		100		100		100		100		100		100	
								% tata kelola keuangan yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100	
								Score Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	75		76		77		78		79		80		80	

			4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	% fasilitasi dan koordinasi Bidang Penataan Organisasi	%	100	1.350.000.000	100	1.485.000.000	100	1.633.500.000	100	1.796.850.000	100	1.976.535.000	100	2.174.188.500	100	9.066.073.500	
			4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	% ANJAB ABK yang disusun	%	100	400.000.000	100	440.000.000	100	484.000.000	100	532.400.000	100	585.640.000	100	644.204.000	100	2.686.244.000	
									Dokumen evaluasi jabatan yang disusun	dok	1		1		1		1		1		1		5		
									% fasilitasi dan koordinasi bidang kelembagaan dan analisis jabatan	%	100		100		100		100		100		100		100		
									% PD yang diukur kematangan kelembagaan	%	100		100		100		100		100		100		100		
			4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen laporan IKM Kabupaten Pacitan	dok	1	500.000.000	1	550.000.000	1	605.000.000	1	665.500.000	1	732.050.000	1	805.255.000	5	3.357.805.000	
									% fasilitasi dan koordinasi bidang pelayanan publik dan tata laksana	%	100		100		100		100		100		100		500		
									Jumlah Unit pelayanan yang nilai indeks pelayanan publiknya baik	Unit Pelayanan	5		5		5		5		5		5		25		
									% Perangkat daerah yang menyusun dan menerapkan SOP sesuai proses bisnis	%	37,5		37,5		37,5		37,5		37,5		37,5		37,5		
									% Perangkat daerah yang nilai IKMnya baik dan meningkat nilainya	%	50		50%		50%		50%		50%		50%		2,5		
			4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	% fasilitasi dan koordinasi bidang kinerja dan reformasi birokrasi	%	100	450.000.000	100	495.000.000	100	544.500.000	100	598.950.000	100	658.845.000	100	724.729.500	100	3.022.024.500	
									Jumlah dokumen kinerja pemerintah daerah yang disusun	dok	3		3		3		3		3		3		15		
									Jumlah PD yang dimonitoring pelaksanaan birokrasinya	kec	12		12		12		12		12		12		60		
									Jumlah unit kerja yang mendapatkan fasilitasi pendampingan pembangunan ZI/WBK/WBBM	Unit Kerja	30		30		30		30		30		30		150		
									Persentase PD yang mendapatkan fasilitasi pendampingan Reformasi Birokrasi	%	100		100		100		100		100		100		100		
									Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK	Unit Kerja	3		3		3		3		3		3		15		
			4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	% fasilitasi dan koordinasi Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan	%	100	650.380.000	100	715.418.000	100	786.959.800	100	865.655.780	100	952.221.358	100	1.047.443.494	100	4.367.698.432	

		4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keptokolan	% fasilitasi dan koordinasi keprotokolan	%	100	300.000.000	100	330.000.000	100	363.000.000	100	399.300.000	100	439.230.000	100	483.153.000	100	2.014.683.000
								% pelayanan keprotokolan	%	100		100		100		100		100		100		100	
		4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	% fasilitasi dan koordinasi komunikasi pimpinan	%	100	350.000.000	100	385.000.000	100	423.500.000	100	465.850.000	100	512.435.000	100	563.678.500	100	2.350.463.500
								Jumlah kegiatan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah yang dipublikasikan	kegiatan	240		240		240		240		240		240			
		4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	% fasilitasi dan koordinasi dokumentasi tugas pimpinan	%	100	380.000	100	418.000	100	459.800	100	505.780	100	556.358	100	611.994	100	2.551.932
								Jumlah dokumentasi kegiatan pimpinan	kegiatan	240		240		240		240		240		240		1200	
		4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% fasilitasi dan koordinasi Bidang kepegawaian PD	%	100	1.223.283.460	100	1.345.611.806	100	1.480.172.987	100	1.628.190.285	100	1.791.009.314	100	1.970.110.245	100	8.215.094.637
		4	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian pimpinan dan staf Sekretariat Daerah	ASN	200	20.000.000	200	22.000.000	200	24.200.000	200	26.620.000	200	29.282.000	200	32.210.200	1000	134.312.200
								Jumlah tata kelola surat menyurat yang diselesaikan	Surat	7000		7000		7000		7000		7000		7000		35000	
		4	1	1	2.05	10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	200	656.443.460	200	722.087.806	200	794.296.587	200	873.726.245	200	961.098.870	200	1.057.208.757	1000	4.408.418.264
								Jumlah sosialisasi media cetak	kali	24		24		24		24		24		24		120	
								Jumlah sosialisasi media elektronik	kali	24		24		24		24		24		24		120	
		4	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta pembinaan disiplin PNS	ASN	200	546.840.000	200	601.524.000	200	661.676.400	200	727.844.040	200	800.628.444	200	880.691.288	1000	3.672.364.172
		4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana PD	%	100	2.886.483.020	100	3.175.131.322	100	3.492.644.454	100	3.841.908.900	100	4.226.099.790	100	4.648.709.769	100	17.085.013.089
		4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan AC	unit	5	281.416.500	5	309.558.150	5	340.513.965	5	374.565.362	5	412.021.898	5	453.224.087	25	498.546.496
								Jumlah pengadaan komputer PC/Laptop	unit	5		5		5		5		5		5		25	
								Jumlah pengadaan Mebelair	buah	6		6		6		6		6		6		30	
								Jumlah pengadaan printer	unit	5		5		5		5		5		5		25	
		4	1	1	2.06	3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah pengadaan Pompa	unit	2	183.684.300	2	202.052.730	2	222.258.003	2	244.483.803	2	268.932.184	2	295.825.402	10	325.407.942

							Jumlah pengadaan Alat Kantor Lainnya	unit	5		5		5		5		5		25				
							Jumlah Pengadaan Mebel	buah	6		6		6		6		6		30				
							Jumlah Pengadaan Alat Pengukur Waktu	buah	7		7		7		7		7		35				
							Jumlah Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	paket	6		6		6		6		6		30				
							Jumlah Pengadaan Meja Kerja Pejabat	buah	3		3		3		3		3		15				
							Jumlah Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	buah	3		3		3		3		3		15	0			
							Jumlah Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	set	3		3		3		3		3		15				
		4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	% pemenuhan makan minum, sewa peralatan, jasa penyelenggara dan natura	%	100	1.051.000.000	100	1.156.100.000	100	1.271.710.000	100	1.398.881.000	100	1.538.769.100	100	1.692.646.010	100	7.058.106.110
		4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	% pemenuhan akomodasi perjalanan dinas luar daerah, dalam daerah dan luar negeri	%	100	1.370.382.220	100	1.507.420.442	100	1.658.162.486	100	1.823.978.735	100	2.006.376.608	100	2.207.014.269	100	9.202.952.540
		4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan kebutuhan dasar PD	%	100	1.244.855.170	100	1.369.340.687	100	1.506.274.756	100	1.656.902.231	100	1.822.592.454	100	2.004.851.700	100	8.359.961.828
		4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	% pemenuhan Alat Tulis Kantor	%	100	1.244.855.170	100	1.369.340.687	100	1.506.274.756	100	1.656.902.231	100	1.822.592.454	100	2.004.851.700	100	8.359.961.828
								% pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	%	100		100		100		100		100		100			
								% Pemenuhan jasa komunikasi, air dan listrik	%	100		100		100		100		100		100			
								% pemenuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	%	100		100		100		100		100		100			
		4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan pemeliharaan BMD	%	100	1.303.100.390	100	1.433.410.429	100	1.576.751.472	100	1.734.426.619	100	1.907.869.281	100	2.098.656.209	100	8.751.114.010
		4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	unit	89	533.600.000	89	586.960.000	89	645.656.000	89	710.221.600	89	781.243.760	89	859.368.136	445	3.583.449.496

			4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% pemenuhan Gaji dan Biaya Operasional Bupati dan Wakil Bupati	%	100	11.968.694.731	100	13.165.564.204	100	14.482.120.625	100	15.930.332.687	100	17.523.365.956	100	19.275.702.551	100	80.377.086.022	
			4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji, Tunjangan dan TPP ASN	bulan	14	11.086.138.731	14	12.194.752.604	14	13.414.227.865	14	14.755.650.651	14	16.231.215.716	14	17.854.337.288	70	74.450.184.123	
			4	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan bulanan dan semester yang dihasilkan	dok	14	882.556.000	14	970.811.600	14	1.067.892.760	14	1.174.682.036	14	1.292.150.240	14	1.421.365.264	70	5.926.901.899	
									Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	dok	7		7		7		7		7		7		35		
									% Pemenuhan administrasi pengelolaan keuangan Setda	%	100		100		100		100		100		100		100		
			4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% fasilitasi dan koordinasi Bidang perencanaan PD	%	100	95.000.000	100	104.500.000	100	114.950.000	100	126.445.000	100	139.089.500	100	152.998.450	100	637.982.950	
			4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dok	7	20.000.000	7	22.000.000	7	24.200.000	7	26.620.000	7	29.282.000	7	32.210.200	35	134.312.200	
			4	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	dok	2	28.000.000	2	30.800.000	2	33.880.000	2	37.268.000	2	40.994.800	2	45.094.280	10	188.037.080	
			4	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA yang disusun	dok	2	19.000.000	2	20.900.000	2	22.990.000	2	25.289.000	2	27.817.900	2	30.599.690	10	127.596.590	
			4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja yang di susun	dok	4	28.000.000	4	30.800.000	4	33.880.000	4	37.268.000	4	40.994.800	4	45.094.280	20	188.037.080	
									Jumlah Dokumen LKjIP yang disusun	dok	1		1		1		1		1		1		5		
									Jumlah dokumen realisasi keuangan dan capaian kinerja yang disusun	dok	12		12		12		12		12		12		60		
							Jumlah					48.088.420.017		52.897.262.019		58.186.988.221		64.005.687.043		70.406.255.747		77.446.881.322		309.272.280.505	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Sekretariat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 seperti pada Tabel T-7.1 berikut:

Tabel T-7.1

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menciptakan Birokrasi Pemerintah Yang Inovatif, Profesional Dan Melayani	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel			B	B	BB	BB	A	A
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemerintahan	Score Nilai Indeks LPPD	Nilai	2.6500	2.7000	2.7500	2.8000	2.8500	2.9000
		Score Nilai Indeks Tata Kelola PBJ	Nilai	45	50	55	60	70	75
	Meningkatnya kualitas tata kelola PD	Score Nilai Sakip PD	Nilai	70	72	74	76	78	80
		Score Nilai IKM PD	Nilai	83	83.5	84	84.5	85	85.5

Indikator kinerja Sekretariat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 seperti pada Tabel T-7.2 berikut:

Tabel T-7.2
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Persentase kebijakan dibidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana	%		100	100	100	100	100	100		
2	Persentase kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi yang terlaksana	%		100	100	100	100	100	100		
3	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Sekretariat Daerah	%		100	100	100	100	100	100		
4	Persentase tata kelola keuangan yang terlaksana	%		100	100	100	100	100	100		
5	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai		>B	>B	>B	>B	>B	>B		
6	Persentase kebijakan dibidang Perekonomian dan SDA yang terlaksana	%		100	100	100	100	100	100		
7	Persentase kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan PBJ secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	%		100	100	100	100	100	100		

8	Persentase kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program pembangunan dan evaluasi pelaporan yang terlaksa	%		100	100	100	100	100	100		
9	Persentase kebijakan dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang terlaksana	%		100	100	100	100	100	100		
10	Persentase kebijakan dibidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	%		100	100	100	100	100	100		
11	Persentase kebijakan dibidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana.	%		100	100	100	100	100	100		

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Sekretariat Daerah maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Pacitan 2021-2026 : ***"MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA"***.

